

STUDY IMPLEMENTATION PLANNING GOODS PROPERTY/WEALTH OF THE UNIVERSITY OF PALANGKA RAYA BY THE GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, NUMBER 6 IN, 2006

STUDI IMPLEMENTASI INVENTARISASI BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006

Manya¹

¹) Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas PGRI Palangka Raya
Jl. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km.7 Palangkaraya Kode Pos 73112

Email: hillepmanya59@gmail.com

ABSTRACT

Research for this know implementation analysis the amount of goods and inventory possession / wealth countries and supporting factors and flexible in the inventory of goods in the possession of wealth University Palangk Raya. Research is carried out in the University of Palangka Raya elections this location the base behalf University of reasoning Palangka Raya is one of a University Charter filter biggest in Central Kalimantan and has attention in the aspects of inventory of goods possession / wealth Accordance with solicitation of reformasion. The analysis use of this data for research engineering analysis is done with all Network to review symptoms of various phenomena observed filter. For providing the closest description explains about the process of inventory management Consumer possession / wealth of the Regulations by the Government of Indonesia. Number 6 In 2006 about management possession of goods Country / Regional. Flexible implementation planning BMN less able and less orderly administration of goods in inventory unit only partially work. Effect against the encrypted Supplies for do it one optimal activity. Catch problems available up to no funds in one specific budget or funds on a regular basis for planning activities to do it products.

Keywords: *Inventory of goods country property (BMN)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan menganalisis jumlah barang inventaris milik/kekayaan negara dan faktor pendukung dan penghambat dalam inventarisasi barang milik kekayaan Negara di Universitas Palangka Raya. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Palangka Raya pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan Universitas Palangka Raya merupakan salah satu Universitas Negeri yang terbesar di Kalimantan Tengah dan mempunyai perhatian dalam hal inventaris barang milik/kekayaan negara sesuai dengan tuntutan reformasi. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis ini dilakukan dengan mengkaji seluruh rangkaian gejala terhadap berbagai fenomena yang diamati. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses pengelolaan Inventarisasi Barang milik/kekayaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah. Hambatan implementasi inventarisasi BMN ini Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai serta kurang tertibnya administrasi inventarisasi barang pada sebagian unit satuan kerja. Sehingga berdampak terhadap sulitnya bagian perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal. Menyangkut masalah dana tidak tersedianya secara khusus anggaran atau dana rutin untuk menyelenggarakan kegiatan inventarisasi barang.

Kata Kunci : *Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)*

PENDAHULUAN

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Barang milik Negara dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), diperlukan penggunaan Barang Negara yang tepat, efektif dan optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian /Lembaga (Peraturan Pemerintah R.I No.6 tahun 2006).

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pencatatan dan pendataan barang milik/kekayaan Negara

pada suatu saat tertentu sedangkan barang milik /kekayaan Negara adalah semua barang milik Negara dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau yang diperoleh di luar APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, maka inventarisasi barang perlengkapan di Universitas Palangka Raya merupakan suatu proses kegiatan untuk memperoleh masukan data

yang diperlukan mengenai data barang-barang milik Negara di bagian perlengkapan yang dikuasai dan diurus oleh Universitas Palangka Raya yang didata terakhir periode tahun 2012, baik barang yang bersumber dari Anggaran Rutin, Pembangunan, maupun berupa pemberian atau hibah, yang selanjutnya diinventarisasi sebagaimana mestinya menurut ketentuan dan cara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun sebagai dasar pelaksanaan inventarisasi di Universitas Palangka Raya didasarkan Peraturan Pemerintah R.I No.6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah.

Berdasarkan hal tersebut agar pembahasan penulis tidak terlalu luas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut (1.) Bagaimanakah implementasi inventarisasi barang milik negara di Universitas Palangka Raya ? (2) Apa saja faktor menghambat dalam pelaksanaan inventarisasi tersebut?, dalam penelitian ini peneliti membatasi inventarisasi yang dilakukan dalam penulisan ini hanya data yang didata terakhir yakni tahun 2012 pada Universitas Palangka Raya oleh Bagian Umum dan Perlengkapan.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pimpinan Universitas Palangka Raya dalam upaya menyusun rencana kebutuhan sarana fisik atau non fisik selanjutnya. Secara akademis diharapkan penelitian ini nanti dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep implementasi inventarisasi barang milik/kekayaan Negara pada skala mikro.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami (natural), dimana penelitian berfungsi sebagai instrument kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan demikian untuk memudahkan dalam pengukuran dari data yang terkumpul melalui beberapa langkah yang dilakukan, antara lain melalui wawancara dengan nara sumber atau penelitian langsung pada objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Universitas Palangka Raya

Sejak berdiri Universitas Palangka Raya sudah banyak sudah menunjukkan kemajuan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional.

Universitas Palangka Raya adalah Universitas yang berada di **Palangka** Raya ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah. Universitas ini berdiri sejak tahun 1963 berdasarkan Surat Keputusan PTIP nomor 141 tanggal 10 November 1963 dengan tiga Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan.

Pada saat yang bersamaan berdiri pula IKIP Bandung cabang **Palangka** Raya, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (**FIP**) dan Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (**FKIS**). Pada

tanggal 24 Juli 1969 IKIP Bandung cabang Palangka Raya tersebut berintegrasi ke dalam Universitas Palangka Raya.

Dalam perjalanan selanjutnya Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan yang waktu itu ditempatkan di Kuala Kapuas hanya dapat berjalan kurang lebih satu tahun. Pada tahun 1973, FKIS diubah namanya menjadi Fakultas Keguruan. Oleh karena itu sampai tahun 1981 Universitas Palangka Raya hanya memiliki tiga Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keguruan. Pada tahun 1981 Universitas Palangka Raya membuka Fakultas baru yaitu Fakultas Non Gelar Teknologi (FNT) yang menyelenggarakan program pendidikan pada jenjang Diploma Tiga (D-3), dan pada tahun 1982 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keguruan digabung menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) hingga sekarang. Sedangkan pada tahun 1991 diresmikan berdirinya Fakultas Pertanian sebagai pengganti Fakultas Non Gelar Teknologi.

Sesuai dengan misi Universitas Palangka Raya yakni merupakan perguruan tinggi terkemuka yang menghasilkan sumberdaya manusia bermutu, bermoral Pancasila, berdaya saing, atau sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penekanan pada daerah rawa gambut tropika serta daerah aliran sungai dan lingkungannya untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional yang berkelanjutan.

Dasar Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik/ Kekayaan Negara

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa proses inventarisasi barang di Universitas Palangka Raya sebenarnya telah mulai dilaksanakan sejak 1 April 1969 untuk pertama kali yaitu berupa kerjasama daftar inventaris barang milik atau kekayaan Negara. yang diatur berdasarkan Inpres RI nomor 3 tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang inventarisasi barang-barang milik negara/kekayaan negara.

Kemudian dalam perkembangan untuk terlaksananya Inpres tersebut Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan dengan nomor : Kep-225/MK/V71971 tanggal 13 April 1971 tentang pedoman pelaksanaan tentang inventarisasi barang-barang milik negara. Kekayaan negara. Disamping keputusan Menteri Keuangan, khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dikeluarkan Instruksi Menteri nomor : 9 tahun 1971 tanggal 23 Oktober 1971 tentang pelaksanaan inventarisasi milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

1. Melakukan pengisian daftar inventaris milik/kekayaan negara yang terdapat pada unit masing-masing sesuai dengan pedoman yang diberikan.
2. Melaksanakan pembuatan rekapitulasi dari pada inventaris unit-unit yang berada di lingkungan unit yang ditugaskan membuat rekapitulasi sesuai

dengan pedoman yang diberikan. Namun dalam perkembangan selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 adalah dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan yang lebih jelas lagi dengan format isian yang baru dalam mengelola aset untuk memperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan inventarisasi barang milik kekayaan negara di lingkungan kemendikbud khususnya Universitas Palangka Raya, maka perlu dipahami dan dikaji terlebih dahulu beberapa tahapan proses kegiatan inventarisasi barang di Universitas Palangka Raya tersebut.

Mengacu kepada PP nomor 6 tahun 2006 bahwa Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang.

Dalam melakukan proses inventarisasi barang milik kekayaan negara memerlukan beberapa proses tahapan sebagai berikut:

1. Penyajian Data

a. Identifikasi Informan sebagai narasumber :

Wawancara yang dilakukan melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang akan ditanyakan. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pembantu Rektor II Universitas Palangka Raya
2. Kepala Bagian UHTP Universitas Palangka Raya
3. Kepala Sub bagian Perlengkapan Rektorat Universitas Palangka Raya
4. Kep. Sub Bag Umum dan Perlengkapan dan Sat.ker unit Universitas Palangka Raya : 11 orang
5. Staf Perlengkapan Rektorat Universitas Palangka Raya : 2 orang

Identifikasi para informan ini diperlukan untuk mengenal karakter informan dari beberapa segi agar dapat dilihat karakteristik masing-masing informan sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih banyak dan optimal sesuai dengan kebutuhan.

b. Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006

Penelitian memfokuskan kajian inventarisasi barang pada implementasi kebijakan PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah. Implementasi dalam hal ini dilihat dari (1) Mekanisme pelaksanaan tugas (2) Sistem pendataan (3)

Sistem pencatatan (4) Sistem Pelaporan (5) Sarana dan Prasarana

1. Kegiatan Pendataan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 120/PMK.06/2007 bahwa kegiatan pendataan dalam inventarisasi barang yakni dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- 1) Tahap pendataan
 - a) Menghitung jumlah barang.
 - b) Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat).
 - c) Menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang telah dihitung.
 - d) Mencatat hasil inventarisasi tersebut pada kertas kerja Inventarisasi.
- 2) Tahap identifikasi
 - a) Pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - b) Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang.
 - c) Pemisahan barang-barang berdasarkan kategori kondisi :
 - Barang Baik dan Rusak Ringan
 - Barang Rusak Berat /tidak dapat dipakai lagi
 - d) Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dan data awal/dokumen sumber:
 - Barang yang tidak ditemukan/hilang
 - Barang yang berlebih.

2. Kegiatan Persiapan Pencatatan

Kegiatan pencatatan adalah sangat penting dalam proses pelaksanaan inventarisasi barang milik kekayaan negara, oleh sebab itu diperlukan keseriusan, kecermatan dan ketelitian sehingga diharapkan semua data barang milik kekayaan negara dapat terekam dengan baik dalam pencatatan buku inventaris barang di lingkungan Universitas Palangka Raya.

Dalam pelaksanaan pencatatan fisik aset barang milik negara ini dilakukan atau dibagi dalam dua bagian yaitu:

- a. Pencatatan fisik barang tidak bergerak

Berdasarkan intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dan surat keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia nomor Kep-225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971 tentang pedoman pelaksanaan inventarisasi barang-barang milik negara/ kekayaan negara. Dalam pelaksanaan inventarisasi ini dimaksudkan adalah untuk menyelenggarakan secara tertib, teratur dan seksama inventarisasi fisik atau menyusun daftar inventarisasi dan rekapitulasi sebagai mana dalam isi intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 9 tahun 1971 tanggal 23 Oktober 1971 yang menyebutkan dimana semua unit organisasi tingkat pusat dan daerah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- b. Pencatatan fisik barang bergerak
Sebagaimana halnya dengan barang tidak bergerak bahwa barang bergerak juga perlu dicatat. Secara tertib kedalam buku inventaris agar dapat diketahui berapa nilai kekayaan yang dimiliki. Adapun yang dilakukan sesuai isi instruksi Menteri tersebut yaitu:

- 1) Melakukan pengisian daftar inventaris milik kekayaan negara yang sesuai dengan pedoman yang diberikan;

Melaksanakan pembuatan rekapitulasi dari pada inventaris unit-unit yang berada di lingkungan unit yang ditugaskan membuat rekapitulasi yang sesuai dengan pedoman yang diberikan. Dengan demikian tidak satupun barang tersebut tidak dicatat ataupun dibukukan.

Berikut akan dibahas hasil-hasil penelitian telah dilakukan, khususnya berkaitan dengan kegiatan pencatatan aset.

Proses Pelaksanaan Pencatatan Aset Berdasarkan penjelasan dari staf Bagian Perlengkapan Direktorat Universitas Palangka Raya dapat dikemukakan oleh sdr. Fanuel Nugroho, S.S. kom

"Bahwa kegiatan pencatatan aset pada dasarnya dilakukan oleh seluruh unit kerja yang ada bersama-sama dengan tim inventarisasi Universitas Palangka Raya,

dalam hal ini pengurus barang yang memiliki kewenangan dalam penggunaan dan pengurusan dari masing-masing unit kerja. Sedangkan kegiatan pencatatan akhir pada tingkat Universitas dilakukan dengan komputerasi oleh Sub. Bagian Perlengkapan pada bagian UHTP BAUK Universitas Palangka Raya". (Wawancara pada tanggal 22 Juni 2013)

Berdasarkan data laporan dari pengurus barang unit/satuan kerja yang menggunakan aset tersebut telah dilakukan pencatatan, namun setelah dilakukan pencatatan ulang di lapangan terhadap barang bergerak. Inventarisasi barang ini dilaksanakan oleh mereka yang memang secara hukum mempunyai fungsi dan kewenangan dalam inventarisasi barang. Dengan kata lain dalam hal penetapan pejabat pelaksana inventarisasi barang itu sudah sesuai dengan petunjuk yang ada, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bagian UHTP Universitas Palangka Raya sdr. Drs. Jontris bahwa

"Dalam rangka pengelolaan aset maka dibentuk Satker pada fakultas petugas pencatat barang beserta atasan langsungnya yang mana sudah menjadi ranah-ranah bagian umum dan perlengkapan dengan Surat Keputusan agar kesinambungan pengelolaan inventarisasi barang dapat terlaksana dengan baik, disamping itu dengan penunjukan tersebut selain memudahkan dalam pemanfaatan data dan aset juga memudahkan koordinasi bilamana terjadi penyimpangan pemanfaatan aset". (Wawancara. pada tanggal 29 Juni 2013).

Hal yang sama juga oleh Pembantu Rektor II Universitas Palangka Raya, Prof. Dr. H. Ciptadi, MS berikut petikan wawancaranya:

"Sekarang itu semua barang hibah atau pemberian dari DIPA, itu semuanya dimasukan ke inventarisasi barang. Barang di monitoring tiap semester baik per triwulan atau per semester atau per tahun dan sekarang pihak Universitas Palangka Raya sudah membentuk Sat.ker ditiap fakultas atau unit untuk membantu menginventarisasi BMN di tiap-tiap Sat.ker masing-masing sehingga laporan bisa up to date." (Wawancara pada tanggal 6 september 2013).



Wawancara dengan informan
Pembantu Rektor II Universitas Palangka Raya Prof. Dr. H. Ciptadi,MS

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pihak pimpinan Universitas Palangka Raya telah mempunyai perhatian yang cukup baik dalam bidang pengelolaan aset yang dimiliki oleh Universitas, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan negara maupun lembaga sendiri.

Pencatatan aset ke dalam buku-buku dan kartu inventaris berdasarkan manual administrasi barang Universitas Palangka Raya tahun 2012 bahwa kegiatan pencatatan dan pelaporan barang milik kekayaan negara di Universitas Palangka Raya hendaknya dituangkan ke dalam komputerisasi oleh Sub. Bagian Perlengkapan pada bagian UHTP BAUK Universitas Palangka Raya.

Berdasarkan data laporan dari pengurus barang unit/satuan kerja yang menggunakan aset tersebut telah dilakukan pencatatan, namun setelah dilakukan pencatatan ulang dilapangan terhadap barang bergerak tim seringkali mendapatkan kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub. Bagian Perlengkapan bahwa barang tersebut ada yang menggunakan bon pinjam tetapi tidak kembali dan ada yang dipinjam secara lisan oleh para mantan pejabat. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa menurut ketentuan untuk pengadaan barang perlengkapan maupun perabot kantor ini dilakukan Pendidikan Tinggi yang utama sedangkan bidang rutin hanya sebagian saja. Memang kendala utama yang dialami dalam proses inventarisasi adalah masalah kurangnya maksimalnya

tugas dan fungsi dari organisasi bagian umum dan perlengkapan pada satker unit sehingga bagian pelaporan yang di sampaikan pada bagian perlengkapan kadang-kadang mengalami hambatan dan terlambat , hal ini disebabkan karena suatu unit menganggap inventarisasi itu tidak begitu penting, apalagi unit tersebut keberadaannya langsung dibawah Rektor bukan berada dibawah BAUK sehingga segala sesuatu mengenai persoalan inventarisasi barang selalu diabaikan.

Kelengkapan bukti kepemilikan dan pemasangan pembatas dalam melakukan pengurusan atas aset yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak bidang, antara lain tanah, jalan, bangunan, kendaraan alat-alat kantor dan sebagainya. Nilai tersebut adalah sesuai dengan harga perolehan pada saat dibeli atau diperoleh. Mengingat banyaknya aset milik kekayaan di Universitas Palangka Raya yang tersebar di seluruh unit maka tentunya perlu dilakukan pengamanan aset terutama terhadap aset berupa tanah dan bangunan yang nilainya sangat besar, memerlukan pengamanan dan salah satu upaya pengamanan terhadap aset tersebut dilakukan dari segi administrasi yaitu dengan persertifikatan tanah milik kekayaan negara. Kegiatan persertifikatan ini dilakukan secara terus menerus dan bertahap. Adapun data tanah milik/dikuasai Universitas Palangka Raya yang sudah bersertifikat dengan jumlah nilai Rp. 94.847.999.000,- dan yang belum bersertifikat per Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Bidang Tanah Universitas Palangka Raya Yang Bersertifikatan, Per Januari 2012

No.	Nama Barang	Luas	Nilai
1.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	890.000	Rp. 43.391.021.000,-
2.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	2.782.355	Rp. 36.861.460.000,-
3.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	27.305	Rp. 10.676.255.000,-
4.	Tanah Bangunan Lab	50.000	Rp. 1.675.000,-
5.	Tanah Bangunan Tempat Kerja lain nya	3.791	Rp. 2.244.272.000,-
	Total	3.753.451	Rp. 94.847.999.000,-

Sumber: Bagian Perlengkapan BAUK UPR



Salah satu bangunan pendidikan di Universitas Palangka Raya

Tabel 2. Jumlah Bidang Tanah Universitas Palangka Raya Yang Belum Bersertifikatan, Per Januari 2012

No.	Nama Barang	Luas	Tahun Perolehan
1.	Tanah Bangunan	2.770	1986
2.	Tanah Hutan Lab Pendidikan Kasongan	50.000.000	1993
	Total	50.002.770	

Sumber: Bagian Perlengkapan BAUK Unpar

Selanjutnya satu bidang tanah hutan lab pendidikan yang berlokasi di jalan Tjilik Riwut Km. 68 Bukit Batu Kasongan.

Untuk melihat jumlah dan jenis bangunan gedung dilingkungan Universitas Palangka Raya yang merupakan barang tidak bergerak sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. Rekap Bangunan-Bangunan Gedung

No.	Nama Bangunan	Jumlah	Nilai
1.	Bangunan Gedung Permanen (Kantor, pendidikan, laboratorium,)	97	Rp. 117.413.342.200,-
2.	Rumah Negara golongan II Permanen (Rumah Dinas)	98	Rp. 12.151.789.000,-

Sumber: Sub. Bagian Perlengkapan BAUK

Tabel 4. Rekap Barang Bergerak Tahun Anggaran 2012

No	Uraian	Nilai
1.	Peralatan dan mesin	Rp. 121.638.778.268,-
2.	Irigasi (saluran drainase)	Rp. 3.808.824.000,-
3.	Jaringan	Rp. 2.054.450.000,-
4.	Aset tetap lain nya seperti alat musik	Rp. 3.218.706.208,-
5.	Aset tetap yang tidak digunakan	Rp. 101.294.800,-
	Total	Rp. 130.822.053.276,-

Sumber: Sub. Bagian Perlengkapan BAUK

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pejabat yang berwenang pada Sub. Bagian Perlengkapan Universitas Palangka Raya dapat dikemukakan tahapan dalam proses perhitungan fisik barang melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Model buku inventaris yang disusun atau dikirim oleh Biro Perlengkapan Mendikbud telah disampaikan pada masing-masing unit pelaksana sebagai acuan awal dalam proses pencatatan
- 2) Dilakukan penghitungan fisik terhadap semua barang milik kekayaan negara di Universitas Palangka Raya oleh masing-masing unit pelaksana. dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan pada unit masing-masing

yaitu fakultas dan lembaga. Penghitungan fisik dilakukan berdasarkan dan DIR (Daftar Inventaris Ruangan) yang ada di unit tersebut.

- 3) Hasil penghitungan fisik pada masing-masing unit dimasukan dalam buku inventaris dan dilaporkan kepada pihak Rektorat dalam hai ini Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- 4) Dilakukan penelitian dan koreksi kembali oleh bagian perlengkapan terhadap laporan yang disampaikan oleh unit untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan kenyataan pelaksanaan penghitungan fisik barang dapat dikemukakan bahwa dasarnya pelaksanaan penghitungan fisik aset cukup sesuai (*compliance*) dengan petunjuk pelaksanaan yang

ada. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Perlengkapan BAUK Universitas Palangka Raya dapat dikemukakan beberapa kelemahan dalam proses penghitungan fisik barang ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Laporan dari masing-masing unit masih banyak yang disampaikan tidak tepat waktu, misalnya dalam melaporkan hasil penghitungan fisik aset barang diluar batas akhir waktu yang ditentukan.
- 2) Nilai aset barang pada tahun 2012 pada tanah yang bersertifikat berjumlah Rp. 94.847.999.000. Untuk gedung dan bangunan berjumlah senilai Rp. 117.413.342.200. Untuk bangunan berupa rumah tangga bernilai sejumlah Rp. 12.151.789.000. Untuk barang bergerak Rp. 121.638.778.265. Total keseluruhan Rp. 385.173.294.197,-

Mengkaji setiap permasalahan dalam pelaksanaan barang tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan *double entry accounting* seluruh unit / satuan kerja di lingkungan Universitas Palangka Raya mengadakan inventaris barang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil penghitungan fisik barang dalam rangka penyusunan neraca awal 2012 agar proses pelaksanaan inventarisasi barang tersebut dapat mewujudkan sesuai tujuan yang diharapkan, maka tahapan pencocokan data dan tahap verifikasi data mendapatkan perhatian yang lebih untuk menyempurnakan mekanisme catatan fisik barang selama ini. Dengan demikian diharapkan kelengkapan, kebenaran, dan akurasi data inventaris barang yang dihasilkan melalui kegiatan pencatatan barang ini akan dapat diraih.

Keberhasilan kegiatan pencatatan tersebut memberikan masukan yang berarti untuk menyempurnakan proses inventaris barang berikutnya, khususnya pada tahapan verifikasi. Sehingga rencana pengadaan barang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 telah dipersiapkan tahapan-tahapan khusus dalam verifikasi sebagai berikut:

- a. Verifikator bersama-sama dengan pengurus barang melakukan pengecekan dilapangan apakah barang-barang tersebut sesuai dilapangan.
- b. Melakukan pengamatan antara data barang dengan kenyataan barang yang ada meliputi jenis barang. volume/jumlah barang. merk dan type barang serta keadaan barang.
- c. Meneliti bidang tanah dan bangunan agar lebih pasti. Untuk itu perlu dilihat dokumen atau bukti kepemilikan yang mendukung serta melakukan pengecekan dilapangan.
- d. Pelaksanaan pekerjaan verifikator diperkuat dengan pembuatan berita acara pencocokan data dan verifikasi barang di Universitas Palangka Raya tahun 2012 dengan isi sebagai berikut :
 - 1) Telah dilakukan pencocokan data inventaris, sesuai data : data inventaris/data awal.

laporan penambahan barang atau usulan penghapusan barang.

- 2) Telah dilakukan verifikasi dengan mengamati, meneliti, mengunjungi langsung terhadap barang-barang tersebut.
- e. Penghitungan fisik berdasarkan penambahan aset rutin dan usaha pendidikan tinggi
Penghitungan fisik aset berdasarkan penambahan aset rutin, dilakukan terus menerus oleh bagian perlengkapan berdasarkan laporan-laporan pengadaan barang yang menggunakan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Sebagaimana dimaklumi penggunaan anggaran rutin tidak hanya untuk belanja habis pakai melainkan juga untuk barang inventaris yang untuk itu harus diinventarisir dan diadministrasikan. Laporan pengadaan barang rutin itu disusun dalam bentuk Daftar Hasil Pengadaan (DHP) yang dilaporkan secara periodik setiap tiga bulan sekali oleh pengurus barang. Pelaporan itu dilakukan paling lambat 17 hari setelah berakhirnya waktu tiga bulan tersebut, sehingga tersebut sudah harus dibagikan perlengkapan tanggal 15 Maret, Juni, September dan Desember tiap tahun anggaran. Berdasarkan penelitian yang telah diakukan dapai dikemukakan beberapa temuan sebagai berikut:

- (1) Secara umum kegiatan pelaporan pengadaan aset rutin itu telah dijalankan, dimana laporan-laporan berbentuk DHP selalu disampaikan kepada bagian perlengkapan. Akan tetapi banyak terjadi laporan DHP itu terlambat dalam penyampaiannya. Hal ini berakibat penghitungan aset untuk pemutakhiran data barang menjadi terhambat penyelesaiannya perperiode.
- (2) Dilihat dari segi kebenaran isi materi DHP yang disampaikan pada umumnya sudah banyak yang benar. Secara kuantitas hanya sejumlah kecil DHP yang isi materinya perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan unit pelaksana karena masih ada yang tidak jelas atau tidak lengkap.

Dengan demikian pelaksanaan penghitungan aset berdasarkan laporan pengadaan barang rutin ini secara umum telah dapat dilakukan dengan baik. Apabila dapat dikemukakan sebagai suatu kelemahan, maka kelemahan proses ini hanya terletak pada masih terjadinya kelambatan dalam penyampaian laporan dan beberapa unit kerja, sehingga penghitungan aset dan segi waktu menjadi sedikit terlambat, sebagai mana yang dikemukakan oleh staf bagian perlengkapan sdr. Drs. Wahyudi, S.Sos yang menangani secara langsung pelaporan dari unit kerja Fakultas teknik:

"Seringkali laporan terlambat dikarenakan banyak data yang seharusnya diisikan kedalam kolom-kolom daftar

laporan, dan agak binggung dalam pengisian sesuai ketentuan. Kejadian semacam ini terjadi berulang-ulang" (Wawancara, 2 Juli 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa proses penghitungan fisik atas penambahan aset usaha pendidikan tinggi ini berjalan dengan ketentuan yang ada. Namun demikian masih terdapat sisi-sisi yang perlu dibenahi, antara lain :

- 1) Untuk ketepatan waktu penyelesaian pendataan dimana hal itu diakibatkan oleh ketergantungan bagian perlengkapan terhadap kecepatan para pimpinan usaha pendidikan tinggi dalam melaporkan tambahan aset di unit kerjanya, sementara pihak pimpinan usaha pendidikan tinggi sendiri selama ini seringkali banyak terkesan lambat memasukan laporan ;
- 2) Seringkali laporan itu belum dilengkapi dengan bukti-bukti, seperti bukti kwitansi pembelian serta dokumen lainnya.

2. Pelaporan Aset

Kegiatan terakhir dalam tahapan implementasi proses inventarisasi barang adalah kegiatan pelaporan aset/data inventaris. Daftar barang memuat daftar barang yang berkurang dan atau bertambah dalam jangka waktu empat bulan bertambah, karena pengadaan baru/pembelian, sumbangan, tukar-menukar, perubahan kualitas, berkurang, karena dijual/dihapuskan, musnah/hilang, disumbangkan, tukar-menukar. Sedangkan daftar rekapitulasi inventaris memuat daftar barang yang berada dalam pengelolaan unit kerja dalam satu tahun anggaran, yang disusun berdasarkan pembidangan jenis barang dimana data yang dimuat bersifat total per bidang.

a) Pelaporan unit pelaksana kepada Rektor

Yang dimaksudkan dengan pelaporan kepada Rektor adalah penyampaian laporan kepada Rektor melalui BAUK/Bagian Perlengkapan selaku unsur pelaksana di Universitas, maka sesuai dengan pedoman proses pelaporan aset adalah dilakukan secara berjenjang.

b) Pelaporan Rektor melalui Biro Administrasi Umum dan Keuangan / Bagian Perlengkapan kepada Menteri

Pada dasarnya implementasi pelaporan data aset barang yang dilakukan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Biro Perlengkapan Mendikbud sudah dilakukan dengan baik.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh staf perlengkapan Direktorat bahwa Fanuel Nugroho, S.Kom;

"Untuk penyampaian laporan semester kepada Menteri keuangan melalui Biro Perlengkapan Mendikbud untuk semester pertama pada tanggal 1 bulan Februari 2012, sedangkan untuk semester kedua pada tanggal 26 bulan Juli 2012". (Hasil wawancara tanggal 27 Juni 2013)."

Dari hasil wawancara tersebut bahwa penyampaian laporan kepada Biro Perlengkapan Mendikbud telah sesuai dengan pedoman dan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian implementasi pelaporan aset dari Universitas Palangka Raya ke Biro Perlengkapan Mendikbud selama ini sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan pedoman yang berlaku. Berdasarkan pembahasan tentang pelaporan aset diatas dapat dikemukakan beberapa temuan sebagai berikut :

- (1) Implementasi pelaporan dari unit kepada Rektor melalui BAUK belum maksimal dilakukan sesuai pedoman.
- (2) Implementasi pelaporan dari unit pelaksana kepada Biro Perlengkapan telah dilakukan sesuai pedoman.
- (3) Implementasi pelaporan dari Rektor kepada Menteri telah dilakukan sesuai pedoman.

Hasil Manajemen Inventarisasi Barang Universitas Palangka Raya untuk memberikan gambaran yang jelas berkaitan dengan kegiatan inventarisasi barang serta dalam menilai hasil atau kinerja manajemen inventarisasi barang ini dapat dilakukan dengan melihat apakah hasil akhirnya dalam hal ini data inventaris yang dihasilkan khususnya berupa tanah dan bangunan gedung sudah memenuhi lengkap dan teruji kebenarannya serta mutakhir sesuai dengan tujuan inventarisasi barang itu sendiri. Dalam kaitan ini data akhir inventaris tersebut perlu dikaji dari beberapa aspek. yakni pertama, kelengkapannya dalam arti apakah data inventaris tanah dan bangunan gedung itu benar-benar telah meliputi seluruh milik yang ada, kedua, tingkat kebenaran atau validitasnya dalam arti apakah data-data itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik jumlah fisik, luas, volume maupun nilainya dan ketiga, tingkat kemutakhiran data dalam arti apakah data yang tersedia merupakan data terakhir yang terus menerus disesuaikan dengan perubahan data.

a. Hasil inventaris barang

Sebelum dilakukan analisis terhadap hasil (*Output*) manajemen inventaris barang, kiranya perlu dikutipkan terlebih dahulu tentang data aktual inventaris barang yang telah dihasilkan dalam proses kegiatan ini. Dari kegiatan inventarisasi dengan dimuktahirkan kembali data melalui mekanisme pelaporan penambahan aset rutin dan usaha pendidikan tinggi

Data tentang barang Universitas bukan hanya untuk kepentingan kegiatan inventarisasi tetapi lebih kepada pembuktian terhadap kepatuhan terhadap kewajiban untuk melakukan pencatatan, oleh karenanya pada bagian terdahulu secara kongkrit telah digambarkan proses inventarisasi barang Universitas mulai dari proses kegiatan pencatatan yang harus didahului dengan penghitungan fisik sampai kepada proses pelaporan. Proses inventarisasi barang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah tetapi juga merupakan sebagai tantangan bagi implementor untuk menjaga kesinambungan kegiatan inventarisasi.

Oleh karena itu jika menyimak proses inventarisasi barang yang selama ini berjalan, dapat dikemukakan bahwa pada umumnya berjalan, namun belum maksimal seperti apa yang diharapkan, berkaitan dengan kelengkapan pelaksanaan pembukuan yang sekaligus mencerminkan tertibnya pelaksanaan inventarisasi oleh unit kerja, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Edyka, S.Sos bagian perlengkapan.

"Bahwa sebenarnya pelaksanaan kegiatan inventarisasi telah kami laksanakan dengan baik dan semua buku-buku dan kartu yang harus kami kerjakan telah terlaksana, hanya saja dalam memperoleh data barang dari pelaksana, kadang kala mengalami hambatan karena ketidaklengkapan data yang disampaikan kepada kami, selain tidak lengkap juga masalah waktu seringkali menjadi kendala, oleh karena itu kadang kala kami yang harus mencari sendiri data hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh pihak lain, dan yang lebih parah lagi adalah adanya keengganan pihak yang melakukan pengadaan kepada kami, sekalipun itu berkali-kali diingatkan oleh atasan, dan tidak tersedianya secara khusus anggaran atau dana rutin untuk menyelenggarakan kegiatan inventarisasi barang." (Wawancara tanggal 23 Juni 2013)

b. Tingkat kelengkapan (*Complete*) data barang Berdasarkan penjelasan dari pada acara temu koordinasi yang dilaksanakan oleh bagian perlengkapan; *"Bahwa implementasi barang memang belum sepenuhnya mampu mengcover keseluruhan aset yang ada, namun saya minta agar dari tahun ke tahun data tersebut terus menerus diperbaiki melalui kegiatan inventarisasi berdasarkan laporan-laporan yang masuk." (wawancara tanggal 23 Juni 2013)*

Dengan demikian dari tahun ketahun makin berkurang jumlah barang yang belum tercover dalam buku induk inventarisasi, sementara setiap tahun pula mengalami penambahan aset baik melalui hasil pengadaan dan menggunakan belanja rutin maupun menggunakan belanja Pembangunan.

c. Tingkat kebenaran (*Validaty*) data barang Dari hasil sensus dan inventarisasi jika dilihat tingkat validitas atau kebenaran data inventaris yang dihasilkan tampaknya selama ini cukup valid apabila dilihat dari kecilnya jumlah barang yang jelas statusnya. Beberapa kondisi dapat dikemukakan sebagai bukti belum cukupnya validitas data inventaris barang tersebut. antara lain sebagai berikut.

Pertama, dari bidang aset yang seharusnya terdata secara keseluruhan. namun belum seluruhnya dapat diinventarisir, kemudian lagi terlihat adanya kejanggalan, seperti misalnya data nilai aset terjadi perbedaan hasil pendataan yang mencolok dari tahun ke tahun. Tampaknya telah terjadi kesalahan dalam proses inventarisasi ini. Kedua, aset berupa tanah dan bangunan sarana peribadatan, pendidikan dan kepentingan sosial lainnya, ada yang hanya tercatat tapi belum jelas tentang alur yang seharusnya berkewajiban melaporkannya.

d. Tingkat kemutakhiran data barang Dalam kegiatan inventarisasi barang dilingkungan Universitas Palangka Raya, barang inventaris milik/dikuasai Universitas Palangka Raya sesuai dengan manual administrasi barang, dikelompokkan dalam beberapa bidang dimana pengelolaannya dilakukan oleh unit / satuan kerja. Barang inventaris tersebut dicatat dalam buku inventaris unit/satuan kerja masing-masing dan dilaporkan secara periodik ke Universitas dalam hal ini melalui bagian perlengkapan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemutakhiran data inventaris barang di lingkungan Universitas Palangka Raya selama ini terjaga dan berkesinambungan dengan baik, sebagaimana yang disampaikan sub. Bagian perlengkapan stok Ade, S.T bahwa ;

"Sekalipun tidak seluruh kolom daftar laporan yang terisi dengan data lengkap, bahkan seringkali terjadi duplikasi, namun kondisi demikian cukup baik, karena adanya niat baik dan rasa tanggung jawab unit kerja, sehingga data selalu diedit dan diperbaharui". (Wawancara 24 Juni 2013).

Dari uraian dan hasil wawancara diatas maka dapat dikemukakan proposisi adalah sebagai berikut dengan kurang tertibnya administrasi baik pada bagian perlengkapan maupun masing-masing unit pelaksana berakibat masih banyaknya aset yang belum terinventarisir secara benar, kondisi demikian sangat merugikan Universitas Palangka Raya sendiri. Selanjutnya hasil wawancara dari kasub.bagian rektorat pengurus barang unit/satuan kerja pada Universitas Palangka Raya Drs. Edyka, S.Sos yang mengelola aset tersebut :

"Ya Pengelolaan Inventarisasi barang BMN pada Universitas Palangka Raya diatur berpedoman pada Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2006 yang mana semua pengelolaan nya sudah dilakukan mengacu pada peraturan ini semua." (wawancara tanggal 25 Juni 2013)

Dari hasil wawancara tersebut bahwa sudah jelas dari pihak Universitas sudah mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas dalam pengelolaan barang berdasarkan PP nomor 6 Tahun 2006. Hal senada juga disampaikan kepada penulis oleh salah satu staf perlengkapan Universitas Sdr. Fanuel Nugroho, S.Kom ketika diwawancara oleh peneliti, berikut hasil wawancara nya :

"Ya semua pengelolaan Barang pada Universitas ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2006 dan PMK 120/PMK.06/2007 tentang penatausahaan barang milik Negara dan kami sudah mempelajari dari kebijakan-kebijakan tersebut". (wawancara tanggal 22 Juni 2013)

Wawancara ini peneliti sudah dapat menarik kesimpulan bahwa sudah jelas bahwa dari apa yang sudah disampaikan sudah tentu dari bagian perlengkapan Universitas Palangka Raya memahami isi dari pengelolaan barang berdasarkan PP nomor 6 Tahun 2006. Akan tetapi ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama kepada Ka.Subag. Perlengkapan FKIP Unversitas Palangka Raya.

Sdr. Drs. Eroplin, apakah mengetahui pengelolaan barang di Universitas Palangka Raya berdasarkan peraturan apa, berikut petikan wawancara nya:

"Saya selaku bagian perlengkapan pada FKIP ini mengetahui pengelolaan Barang milik Negara Universitas Palangka Raya berdasarkan PP No 6 tahun 2006, akan tetapi saya kurang mengerti dari isi Peraturan Pemerintah tersebut karena selama ini kurang di lakukan sosialisasi peraturan tersebut, hanya yang saya selama cuma lewat surat edaran pemberitahuan dari pihak Universitas." (wawancara tanggal 20 Juni 2013)

Pernyataan di atas di dukung oleh bagian perlengkapan unit lain nya seperti hal nya yang disampaikan oleh Ka.Subag perlengkapan Fakultas Teknik Drs. Wahyudin, S.Sos berikut hasil wawancara nya :

"Iya sudah tau saya kalau pengelolaan barang ini diatur berdasarkan PP nomor 6 tahun 2006, tapi saya tahu nya sebatas pada surat edaran pemberitahuan saja ketika akan dilaksanakan kegiatan inventarisasi barang di lingkungan Fakultas, untuk mekanisme pelaksanaan yang berdasarkan peraturan tersebut kami kurang memahami yang sebenarnya. Apalagi selama ini untuk menginventarisasi barang belum ada sarana pendukung nya seperti sarana computer khusus untuk BMN." (wawancara tanggal 20 Juni 2013)

Selanjut peneliti kembali mengunjungi Fakultas Hukum untuk mencari informasi yang ingin peneliti cari, dan peneliti menemui kasubag perlengkapan dengan sdr. Drs. Yulianto berikut petikan wawancara dengan beliau :

"Sudah tau inventarsasi barang disini berdasarkan kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006, tetapi untuk mekanisme belum tau atau kurang memahami dengan jelas, karena selama ini belum ada pelatihan untuk melaksanakan bagaimana tugas dari bagian perlengkapan ini dalam mengelola inventarisasi barang yang sebenarnya." (wawancara tanggal 21 Juni 2013)

Kemudian peneliti mencoba mengunjungi Fakultas Ekonomi dan menemui Staf.bag. Perlengkapan dengan sdr. Drs. Bebi Huwai untuk mewawancarai dan mencari informasi yang ingin peneliti cari. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

"Ya, saya selaku staf perlengkapan tau saja untuk pengelolaan barang di sini berdasarkan PP nomor 6 tahun 2006 akan tetapi masih belum tau dan kurang memahami juga isi dari kebijakan itu" (wawancara tgl 22 Juni 2013).

Pernyataan di atas diperkuat dari hasil wawancara dengan Fakultas Pertanian staf sub.bag. perlengkapan lain sdr. Drs. Ibrahim berikut hasil wawancara nya :

"Sudah, saya tau saja untuk pengelolaan BMN berdasarkan PP nomor 6 tahun 2006 tetapi belum tau persis apa isi di dalam PP tersebut saya cuma tau dapat surat edaran saja. Kalau mekanisme nya seperti apa kami kurang mengerti memahami nya

belum ada sosialisasinya." (wawancara tgl 23 Juni 2013).

Selanjutnya peneliti melanjutkan nya ke Fakultas kedokteran dan menemui dengan sdr. Soekarno, SE kasub.bag. perlengkapan beliau menyampaikan hal yang senada juga, berikut petikan wawancara nya :

"Sudah, tau inventarsasi barang berdasarkan kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006, kalau ditanya menyangkut mekanisme pelaksanaan tugasnya kami masih menjalankan tugas sesuai dengan permintaan dari pihak Universitas, akan tetapi untuk isi dari sebenarnya berdasarkan PP tersebut belum memahami dengan benar." (wawancara tgl 24 Juni 2013).

Dari uraian di atas diketahui bahwa implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 masih belum diberi nilai layak karena hasil wawancara ternyata rata-rata tidak memahami isi dalam kebijakan peraturan tersebut karena belum ada sosialisasi dari pihak Universitas Palangka Raya. Setelah memperhatikan dan mempelajari dari faktor penghambat dari kegiatan pelaksanaan tugas inventarisasi barang, dari hasil uraian pernyataan dari setiap unit-unit sudah dapat disajikan sebagai berikut bahwa pelaksanaan inventarisasi BMN (Barang Milik Negara) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga penyajian asset BMN masing-masing satuan kerja belum menggambarkan nilai yang sebenarnya, terkait kualitas SDM kurang memadai serta kurang tertibnya administrasi inventarisasi barang masing-masing satuan kerja. Sehingga berdampak terhadap sulitnya bagian perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal.

c. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dilakukan pembahasan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan inventarisasi barang milik kekayaan negara di Universitas Palangka Raya berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara sebagai berikut :

1. Implementasi inventarisasi barang milik kekayaan negara

Mekanisme pelaksanaan tugas terlihat dalam kegiatan penghitungan fisik asset yang dilaksanakan menampakan hasil yang dikategorikan cukup, dikarenakan masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan, sedangkan sistem koordinasi yang ada juga masih menunjukkan hasil yang belum maksimal hal ini terlihat dalam kegiatan pencatatan aset, dimana dalam penyerahan awal aset seringkali tidak disertai dokumen, pengamanan aset masih tersentralisir pada bagian perlengkapan sehingga unit-unit kerja tidak dapat melakukan pengamanan. Untuk sistem komunikasi juga belum sesuai dengan pedoman hal ini tercermin

dalam kegiatan penyampaian pelaporan dari unit-unit kerja kepada Universitas melalui Biro UHTP bagian perlengkapan. Sebagai dasar pijakan dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik kekayaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 ternyata belum mampu memposisikan sebagai landasan kebijakan guna mengatur inventaris barang secara maksimal di Universitas Palangka Raya karena disebabkan diantaranya antara lain terbatasnya dana operasional yang disediakan, terbatasnya SDM berkualitas sebagai unsur pelaksana.

Mengkaji pendapat di atas, bahwa kurang optimalnya penyelenggaraan fungsi-fungsi manajerial pada obyek penelitian sangat tergantung dari kemampuan kelompok manajemen pengambil keputusan, disamping faktor kebijakan lain yang diterapkan oleh pembuat kebijakan dalam inventarisasi barang milik kekayaan negara di lingkungan Universitas Palangka Raya, didapat sebagai berikut :

1. Mekanisme inventarisasi barang yang dilaksanakan terdiksi oleh bagian umum dan perlengkapan di Universitas Palangka Raya. Semua barang hibah atau pemberian dari DIPA itu semuanya dimasukkan ke inventarisasi barang. Barang di monitoring tiap semester baik per triwulan atau persemester atau pertahun. Sedangkan kegiatan pencatatan akhir pada tingkat Universitas dilakukan dengan komputerisasi oleh Sub. Bagian Perlengkapan pada bagian UHTP BAUK Universitas Palangka Raya.
2. Sistem pendataan yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tahap pendataan
Menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat), menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang telah dihitung, mencatat hasil inventarisasi tersebut pada kertas kerja Inventarisasi.
 - b. Tahap identifikasi
Pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodifikasi barang, pemisahan barang-barang berdasarkan kategori kondisi barang baik/rusak ringan/ rusak berat /tidak dapat dipakai lagi, meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dan data awal/dokumen sumber :

- Barang yang tidak diketemukan/hilang
- Barang yang berlebih.

3. Sistem Pencatatan pencatatan aset pada dasarnya dilakukan oleh seluruh unit kerja yang ada bersama-sama dengan tim inventarisasi Universitas, dalam hal ini pengurus barang yang memiliki kewenangan dalam penggunaan dan pengurusan dari masing-masing unit kerja. Sedangkan kegiatan pencatatan akhir pada tingkat Universitas dilakukan dengan komputerisasi oleh Sub. Bagian Perlengkapan pada bagian UHTP BAUK Universitas Palangka Raya.
4. Sistem Pelaporan yang dilaksanakan di Universitas Palangka Raya penyampaian laporan kepada Biro Perlengkapan Mendikbud telah sesuai dengan pedoman dan jadwal yang telah ditetapkan. Akan tetapi pelaporan dari satker unit seringkali laporan terlambat dikarenakan banyak data yang seharusnya diisikan kedalam kolom-kolom daftar laporan, dan petugas agak binggung dalam pengisian sesuai ketentuan. Berdasarkan pembahasan tentang pelaporan aset diatas dapat dikemukakan beberapa temuan sebagai berikut :
 - (1) Implementasi pelaporan dari biro perlengkapan kepada Rektor melalui BAUK dilakukan sesuai pedoman.
 - (2) Implementasi pelaporan dari satker unit pelaksana kepada Biro Perlengkapan belum dilakukan sesuai ketentuan dan masih belum maksimal sehingga bagian perlengkapan Universitas Palangka Raya perlu meminta ulang penginventarisasi lagi.
 - (3) Implementasi pelaporan dari Rektor kepada Menteri masih belum sesuai pedoman.

Hasil Manajemen Inventarisasi Barang Universitas Palangka Raya untuk memberikan gambaran yang jelas berkaitan dengan kegiatan inventarisasi barang serta dalam menilai hasil atau kinerja manajemen inventarisasi barang ini dapat dilakukan dengan melihat apakah hasil akhirnya dalam hal ini data inventaris yang dihasilkan khususnya berupa tanah dan bangunan gedung sudah memenuhi lengkap dan teruji kebenarannya serta mutakhir sesuai dengan tujuan inventarisasi barang itu sendiri.
5. Dukungan sarana dan prasarana.
Dalam kaitan pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik kekayaan negara di Universitas Palangka Raya selama ini telah cukup mendapat dukungan fasilitas dan

sarana operasional, sebagaimana dinyatakan oleh bagian perlengkapan selaku pengemban tanggung jawab pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang ini.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Inventarisasi Barang di Universitas Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 tahun 2006

a. Faktor pendukung kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Dalam Inventarisasi BMN di Universitas Palangka Raya

Dalam mendukung keberhasilan implementasi inventarisasi BMN di Universitas Palangka Raya pengelolaan inventarisasi barang sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan inventarisasi barang, maka dilakukan penelitian terhadap beberapa faktor yang secara konseptual berpengaruh.

Faktor Pendukung (a) Organisasi pelaksana (b) Dukungan pimpinan dan pihak terkait

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan berbagai temuan tentang faktor-faktor tersebut serta pengaruhnya terhadap implementasi inventarisasi barang sebagai berikut:

a. Organisasi pelaksana

Faktor organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan keberhasilan manajemen inventarisasi barang. Untuk mendapatkan deskripsi tentang pengaruh organisasi pelaksana terhadap manajemen inventarisasi barang ini, maka pengkajiannya dilakukan terhadap tiga indikator yang relevan, yakni : 1) Tingkat otoritas atau lingkup kewenangan 2) Kapasitas sumberdaya SDM, dana operasional, dan sarana/fasilitas operasional 3) Kualitas koordinasi dalam organisasi pelaksana tersebut.

Dalam kaitannya pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik kekayaan negara di Universitas Palangka Raya sudah tervoksi pada bagian UHTP bagian perlengkapan dan dibantu pada setiap satker unit.

b. Dukungan pimpinan dan pihak terkait, faktor dukungan pimpinan dan pihak terkait, dalam hal ini ada dua pihak. Pertama, unsur pimpinan-pimpinan unit terlibat secara langsung dengan kegiatan inventarisasi barang milik kekayaan negara sehingga ikut berpengaruh terhadap kelancaran proses inventarisasi aset serta pencapaian hasilnya, kedua pihak terkait secara teoritis apabila pihak-pihak terkait itu memberikan

dukungan positif terhadap kegiatan inventarisasi dengan memberikan fasilitas seperti computer dan kendaraan operasional, ini tentunya akan memperlancar proses dan meningkatkan kualitas hasilnya.

c. Faktor penghambat Dalam Inventarisasi BMN di Universitas Palangka Raya

Beberapa hal yang menghambat dari implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 dalam pelaksanaan inventarisasi BMN (Barang Milik Negara) di Universitas Palangka Raya, yang ingin ketahui oleh peneliti dengan mencari informasi langsung kepada informan yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana dari pelaksanaan inventarisasi BMN.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data atau pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat membuat beberapa pokok kesimpulan terhadap implementasi kebijakan inventarisasi barang milik kekayaan negara di lingkungan Universitas Palangka Raya sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan inventarisasi barang milik kekayaan negara di Universitas Palangka Raya masih belum optimal yang disebabkan oleh beberapa permasalahan yang menjadikan kendala sehingga pelaksanaan inventarisasi terhadap barang tidak dapat dilaksanakan secara tuntas oleh masing-masing satker unit pelaksana. Dalam mekanisme pelaksanaan tugas terlihat dalam kegiatan penghitungan fisik aset yang dilaksanakan menampilkan hasil yang dikategorikan cukup, dikarenakan masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan. Secara umum pelaksanaan terinventarisasi barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Palangka Raya belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan maksimal sehingga penyajian aset data barang masing-masing satuan kerja belum menggambarkan nilai sebenarnya secara keseluruhan dan kurang lengkap karena SDM kurang mengertinya dalam pelaksanaan bentuk pengisian format data berdasarkan ketentuan dan belum diberi nilai layak. Kegiatan inventarisasi barang di lingkungan Universitas Palangka Raya belum terorganisasi atau terordinasi dengan baik, belum dilaporkan sesuai dengan ketentuan, sering belum lengkap dan belum tepat waktu.

2. Faktor-faktor Pendukung Implementasi Inventarisasi Barang di Universitas Palangka Raya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 tahun 2006:

a) Organisasi pelaksana

Untuk itu organisasi pelaksana dari tervoksi sub di bagian perlengkapan dan satker per unit yang membantu dalam pelaksanaan inventarisasi

- barang, baik di tingkat satker unit sudah dilakukan oleh sub pada bagian perlengkapan.
- b) Dukungan pimpinan dan pihak terkait, sudah memberikan dukungan positif terhadap kegiatan inventarisasi dengan memberikan fasilitas seperti computer dan kendaraan operasional, ini tentunya akan memperlancar proses dan meningkatkan kualitas hasilnya.
3. Faktor Penghambat Implementasi Inventarisasi Barang di Universitas Palangka Raya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 tahun 2006 sebagai berikut:
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai serta kurang tertibnya administrasi inventarisasi barang pada sebagian unit satuan kerja. Sehingga berdampak terhadap sulitnya bagian perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdul Wahab .1991. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi II. Bumi Aksara. Jakarta
- Arifin, Ghozali, Iman. 1996. *Pokok-pokok Akutansi Pemerintahan*. BPFE. Yogyakarta
- Hendrato Rusdianrasah. 2005. *Pelaksanaan Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara*. Didownload dari www.uns.ac.id tanggal 1 April 2013
- Islamy, S.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- K. Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Resit Sosial*. Mundur Madu. Bandung.
- Kridawati, Faisal Anwar. 2004. *Etika Birokrasi*. Universitas Malang
- Nugroho, Riant D.2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Samudra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sogiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Syamsi.1983. *Administrasi Perlengkapan Material Pemerintah Daerah*.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Syarbaini, Syahril. 2009. Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi. Bogor : Ghalia Indonesia
- _____. 2012. Profil Of University Of Palangka Raya. UNPAR
- Undang-Undang atau Keputusan-Keputusan: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara